

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Berjalan, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Kalimantan Timur, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, 19 Juli 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

Drs.Sufian Agus, M.Si.

NIP. 19660204 198803 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	41
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	42
2.4. Review Terhadap RKPD Perubahan	53
2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat .	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	67
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	67
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	75
BAB V PENUTUP	88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 22 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi dari pelaksanaan Rencana Kerja 2022. Rancangan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan, melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu perencanaan yang baik. Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 didasarkan kepada Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2019-2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja 2022.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, RENJA PERUBAHAN SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
48. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
49. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini adalah sebagai pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator dan pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur untuk penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target dan perubahan pagu anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Tahun 2022;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (Triwulan II)

Pada Tahun 2022 ada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan visi **”Terwujudnya Masyarakat Yang Damai, Tentram dan Demokratis, Serta Berwawasan Kebangsaan Di Wilayah Kalimantan Timur”**.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, OKP, LSM, Etnis, dan juga pramuka dan pelajar, baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, sebagai berikut:

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	36,00	Bulan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,00	Dokumen	PMDN 13	6,00	6,00	100,00	6,00	12,00	66,67
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	3,00	300,00	1,00	4,00	133,33
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,00	Dokumen	PMDN 13	5,00	5,00	100,00	5,00	10,00	66,67
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36,00	Bulan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	42,00	Laporan	PMDN 13	14,00	14,00	100,00	14,00	28,00	66,67
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36,00	Laporan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36,00	Laporan	PMDN 13	12,00	-	-	12,00	12,00	33,33
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36,00	Laporan	PMDN 13	12,00	-	-	12,00	12,00	33,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan (TLHP)	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	54,00	Laporan	PMDN 13	18,00	18,00	100,00	18,00	36,00	66,67
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis dan Evaluasi Realisasi Anggaran	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	36,00	Bulan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekapitulasi Nilai Aset	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Kendali Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milk Daerah	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
1.05.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	67,00	Orang	PMDN 13	67,00	-	-	67,00	67,00	100,00
1.05.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	67,00	Orang	PMDN 13	67,00	-	-	67,00	67,00	100,00
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Non ASN	67,00	Orang	PMDN 13	67,00	-	-	67,00	67,00	100,00
1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	55,00	Dokumen	PMDN 13	55,00	-	-	55,00	55,00	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	100,00
1.05.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55,00	Laporan	PMDN 13	55,00	-	-	55,00	55,00	100,00
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,00	Bulan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan	30,00	Laporan	PMDN 13	10,00	30,00	300,00	10,00	40,00	133,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perlengkapan Kantor									
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	6,00	Unit	PMDN 13	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	66,67
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,00	Laporan	PMDN 13	2,00	-	-	2,00	2,00	33,33
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,00	Laporan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	13140,00	Surat Kabar	PMDN 13	4.380,00	4.380,00	100,00	4.380,00	8.760,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,00	Dokumen	PMDN 13	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	66,67
1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis	3,00	Dokumen	PMDN 13	1,00	-	-	1,00	1,00	33,33
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	15,00	Sistem	PMDN 13	5,00	-	-	5,00	5,00	33,33
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	17,00	Unit	PMDN 13	11,00	-	-	11,00	11,00	64,71

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	17,00	Unit	PMDN 13	11,00	-	-	11,00	11,00	64,71
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	36,00	Bulan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4500,00	Lembar	PMDN 13	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	3.000,00	66,67
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,00	Laporan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN	39,00	Laporan	PMDN 13	13,00	13,00	100,00	13,00	26,00	66,67
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	36,00	Bulan	PMDN 13	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	66,67
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	63,00	Unit	PMDN 13	21,00	21,00	100,00	21,00	42,00	66,67
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	150,00	Unit	PMDN 13	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									-	-
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik									-	-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21,00	%	PMDN 13	6,00	5,79	96,47	7,00	12,79	60,90
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	31991,00	Orang	PMDN 13	9.140,00	8.817,00	96,47	10.664,00	19.481,00	60,90

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	9,00	Laporan	PMDN 13	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	66,67
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	24,00	Laporan	PMDN 13	8,00	8,00	100,00	8,00	16,00	66,67
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah Laporan Hasil	30,00	Laporan	PMDN 13	10,00	10,00	100,00	10,00	20,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan									
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	3,00	O/T	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	3,00	O/T	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan										
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	75,50	%	PMDN 13	74,50	64,56	86,66	67,50	132,06	174,91
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	56,85	%	PMDN 13	56,65	34,52	60,94	56,75	91,27	160,55

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	9,00	Laporan	PMDN 13	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	15,00	Laporan	PMDN 13	5,00	5,00	100,00	5,00	10,00	66,67
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Laporan Hasil	33,00	Laporan	PMDN 13	11,00	11,00	100,00	11,00	22,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan									
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	3,00	O/T	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	3,00	O/T	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	100,00	%	PMDN 13	27,25	28,34	104,00	32,70	61,04	61,04
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	367,00	Organisasi Masyarakat	PMDN 13	100,00	104,00	104,00	120,00	224,00	61,04
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	9,00	Laporan	PMDN 13	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	6,00	Laporan	PMDN 13	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	66,67
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	30,00	Laporan	PMDN 13	10,00	10,00	100,00	10,00	20,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	300,00	%	PMDN 13	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	66,67
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	12,00	Rekomendasi	PMDN 13	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	66,67
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil	9,00	Laporan	PMDN 13	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja									
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	12,00	Laporan	PMDN 13	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	66,67
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Laporan Hasil	24,00	Laporan	PMDN 13	8,00	8,00	100,00	8,00	16,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan									
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Pelaksanaan	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Monitoring dan Evaluasi									
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	100,00	%	PMDN 13	33,66	38,15	113,33	33,33	71,48	71,48
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial di	303,00	Konflik	PMDN 13	102,00	90,00	88,24	101,00	191,00	63,04

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kalimantan Timur									
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Program Kerja	9,00	Laporan	PMDN 13	3,00	3,00	100,00	3,00	6,00	66,67
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan	12,00	Laporan	PMDN 13	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan	33,00	Laporan	PMDN 13	11,00	11,00	100,00	11,00	22,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	3,00	Laporan	PMDN 13	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	66,67
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	300,00	%	PMDN 13	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	66,67

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 77.430.576.481,00 yang terbagi menjadi Rp 13.387.045.391,00 untuk anggaran Sekretariat dan Gaji serta Rp 64.043.531.090,00 untuk anggaran penunjang kegiatan dan hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	SP M	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	1,99%	3,97%	7,00%	8,00%	
Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat			67,00%	67,50%	68,00%	68,50%	66,27%	64,56%	68,00%	68,50%	
Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim			120Ormas	27,25%	32,70%	40,05%	178 Ormas	22,07%	27,25%	32,70%	
Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			-	100,00%	100,00%	100,00%	-	75,00%	100,00%	100,00%	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di			102 Konflik	33,66%	33,33%	33,00%	70Konflik	21,45%	33,33%	33,00%	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2019, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

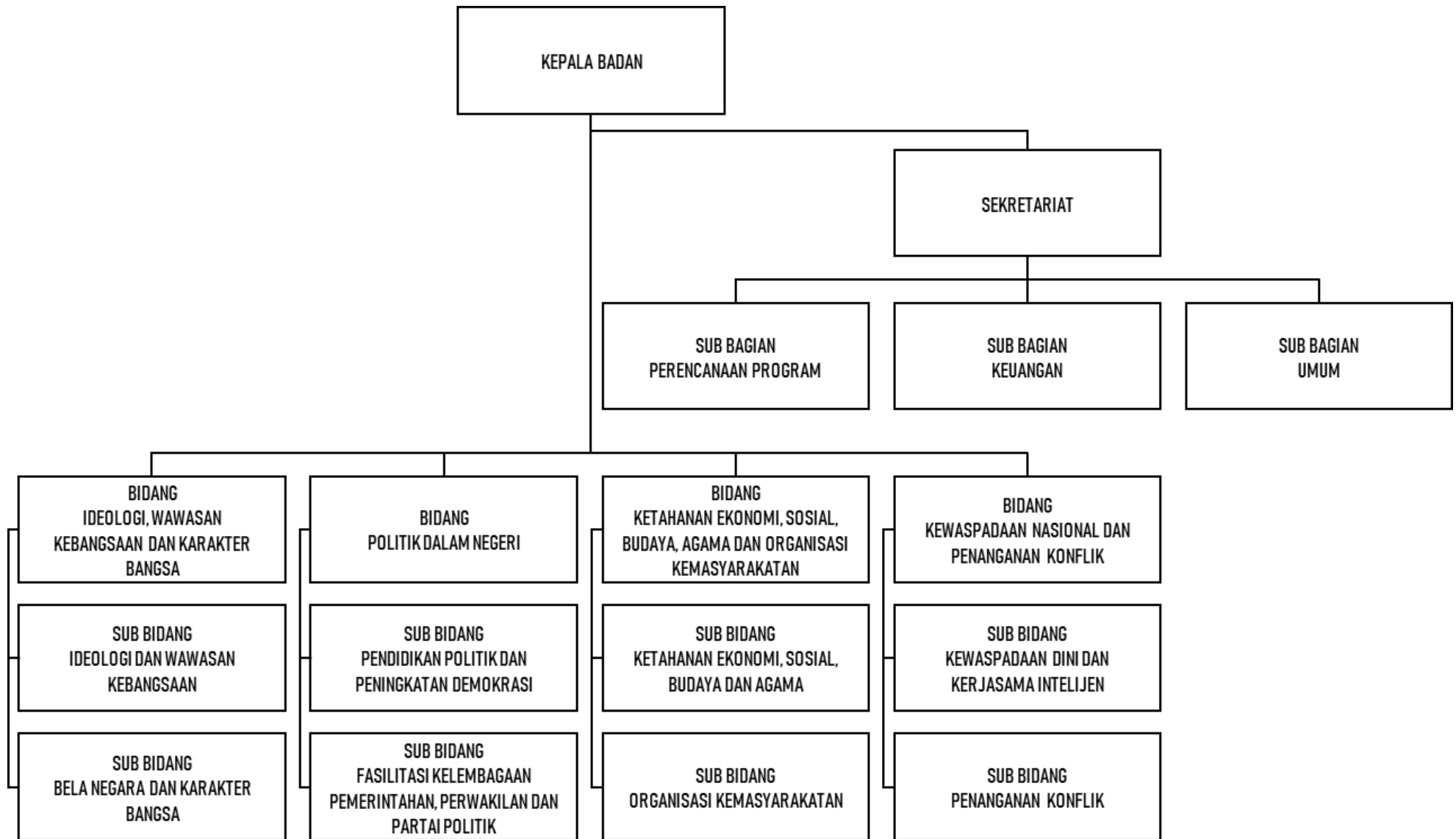
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2016 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub bagian Perencanaan Program;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Sub bagian Umum.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 1. Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1. Sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Sub bidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Politik Dalam Negeri membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:
- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
 - b. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dalam penghayat kepercayaan;
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan,

- pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur maka terdapat isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
4. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
5. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
6. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan

konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Ranwal RKPD dan hasil Analisa kebutuhan pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.983.532.391	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.983.532.391	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				13.983.532.391	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					13.983.532.391	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	12,00 Bulan	13.983.532.391	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	12,00 Bulan	13.983.532.391		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	13,00 Dokumen	363.576.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	13,00 Dokumen	363.576.000		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12,00 Bulan				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	12,00 Bulan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,00 Dokumen	9.798.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,00 Dokumen	9.798.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00 Laporan	353.778.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00 Laporan	353.778.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00 Bulan	10.247.151.235	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00 Bulan	10.247.151.235		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00 Bulan				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00 Bulan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41,00 Orang/Bulan	9.791.999.235	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41,00 Orang/Bulan	9.791.999.235		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,00 Dokumen	47.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,00 Dokumen	47.560.000		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00 Dokumen	346.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00 Dokumen	346.320.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,00 Laporan	61.272.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,00 Laporan	61.272.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12,00 Bulan	9.636.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12,00 Bulan	9.636.000		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12,00 Bulan				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	12,00 Bulan			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00 Laporan	9.636.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00 Laporan	9.636.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang	12,00 Bulan	51.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang	12,00 %	51.000.000		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		Prov. Kaltim	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	60,00	Orang			Prov. Kaltim	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	60,00	Orang		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2,00	Paket	51.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2,00	Paket	51.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	1.745.634.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Barang dan Jasa Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	1.745.634.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	Paket	599.624.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	Paket	599.624.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,00	Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,00	Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00	Dokumen	11.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00	Dokumen	11.520.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00	Laporan	1.094.490.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00	Laporan	1.094.490.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Kendaraan Dinas Terpenuhiya Kebutuhan Kendaraan Dinas	2,00	Unit	788.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Kendaraan Dinas Terpenuhiya Kebutuhan Kendaraan Dinas	4,00	Unit	788.750.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Disediakan	2,00	Unit	788.750.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Disediakan	4,00	Unit	788.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	493.885.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	493.885.656	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	63.500.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	63.500.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	415.385.256	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	415.385.256	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12,00	Bulan	283.899.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Kaltim	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12,00	Bulan	283.899.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18,00	Unit	150.194.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18,00	Unit	150.194.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	75,00	Unit	133.705.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	75,00	Unit	133.705.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prov. Kaltim		-		68.182.658.090	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prov. Kaltim		-		68.182.658.090	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Kaltim	-	-	68.182.658.00	Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Kaltim	-	-	68.182.658.00	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8,00 %	1.728.295.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8,00 %	1.728.295.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	1.728.295.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	1.728.295.000	
			Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12187,00 Orang				Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12187,00 Orang		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1,00 Dokumen	19.510.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1,00 Dokumen	19.510.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1,00 Dokumen	5.280.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1,00 Dokumen	5.280.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1370,00 Orang	1.152.705.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1370,00 Orang	1.152.705.000	Hibah PPK 200JT
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18,00 Orang	206.400.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18,00 Orang	206.400.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	344.400.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	344.400.000	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prov. Kaltim	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	75,50 %	3.789.628.800	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prov. Kaltim	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	75,50 %	3.789.628.800	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	3.789.628.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	3.789.628.800	
			Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	56,85 %				Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	56,85 %		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen	1.950.770.800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen	1.950.770.800	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen	3.240.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen	3.240.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	605,00 Orang	976.194.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	605,00 Orang	976.194.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42,00 Orang	405.412.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42,00 Orang	405.412.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	454.012.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	454.012.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prov. Kaltim	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	40,05 %	58.023.670.290	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prov. Kaltim	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	40,05 %	58.023.670.290	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	58.023.670.290	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	58.023.670.290	
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	147,00 Organisasi Masyarakat					Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina		147,00 Organisasi Masyarakat

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
1	Penyusunan Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	18.652.000	Penyusunan Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	18.652.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	1.166.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	1.166.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	330,00	Orang	57.702.652.290	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	330,00	Orang	57.702.652.290	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11,00	Orang	108.000.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11,00	Orang	108.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	193.200.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	193.200.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prov. Kaltim	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100,00	%	822.380.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prov. Kaltim	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100,00	%	822.380.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00	Dokumen	822.380.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00	Dokumen	822.380.000	
			Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4,00	Rekomendasi				4,00	Rekomendasi			
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	364.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	364.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	1.200.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1,00	Dokumen	1.200.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	410,00 Orang	532.216.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	410,00 Orang	532.216.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12,00 Orang	108.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12,00 Orang	108.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	180.600.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	180.600.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prov. Kaltim	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33,00 %	3.818.684.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prov. Kaltim	Penanganan Konflik Ipoleksosbud	33,00 %	3.818.684.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	3.818.684.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis	1,00 Dokumen	3.818.684.000	
			Penurunan Jumlah Konflik Ipoleksosbud	85,00 Konflik				Penurunan Jumlah Konflik Ipoleksosbud	85,00 Konflik		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen	720.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen	720.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	550,00 Dokumen	2.568.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	550,00 Dokumen	2.568.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	200,00 Orang	901.261.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	200,00 Orang	901.261.000	

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	4 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5	6	7 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	9 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	11	12
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22,00 Orang	216.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22,00 Orang	216.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00 Laporan	302.400.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00 Laporan	302.400.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	2.395.735.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	2.395.735.000	

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dijelaskan dari tabel berikut

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	PROV. KALTIM	-	195.000.000,00	DPP IARMI Provinsi Kaltim
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	PROV. KALTIM	-	190.000.000,00	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kubar
3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	PROV. KALTIM	-	1.259.984.000,00	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
--	--	--	--	--

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan dan dapat mencapai target yang dicapai, maka pada masa pemerintahan tahun 2020-2024 mempunyai Visi, Misi dan beberapa agenda prioritas yang tercantum sebagai berikut:

VISI: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis, dengan tujuan:**

- Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis

2. Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan, dengan tujuan:

- Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan

3. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan tujuan:

- Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kalimantan Timur

4. Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur, dengan tujuan:

- Terwujudnya Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur

Berdasarkan visi dan misi beserta penjelasannya, diatas maka sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Demokratis**, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur Yang Berwawasan Kebangsaan**, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Khususnya Pelajar SLTA di Kalimantan Timur
3. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan**, dengan sasaran:

- Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Sasaran yang hendak dicapai **Misi: Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kalimantan Timur**, dengan sasaran:
- Meningkatnya Kewaspadaan Dalam Menjaga Kondusifitas yang Tertib, Aman dan Nyaman di Kalimantan Timur

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 ada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan total pagu Rp 77.430.576.481,00.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan

- Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.983.532.391		
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					13.983.532.391		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	13.983.532.391	PAD	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	363.576.000	PAD	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	13,00	Dokumen	9.798.000	PAD	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	8,00	Laporan	353.778.000	PAD	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	10.247.151.235	PAD	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kaltim	41,00	Orang/Bulan	9.791.999.235	PAD	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kaltim	2,00	Dokumen	47.560.000	PAD	
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	346.320.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	13,00	Laporan	61.272.000	PAD	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah PD	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	9.636.000	PAD	
1.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim	4,00	Laporan	9.636.000	PAD	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Yang Disiplin, Profesional dan Bertanggungjawab	Prov. Kaltim	60,00	Orang	51.000.000	PAD	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Kaltim	2,00	Paket	51.000.000	PAD	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	1.745.634.000	PAD	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	6,00	Paket	599.624.000	PAD	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kaltim	7,00	Paket	40.000.000	PAD	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov. Kaltim	12,00	Dokumen	11.520.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim	6,00	Laporan	1.094.490.000	PAD	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	Prov. Kaltim	2,00	Unit	788.750.000	PAD	
1.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov. Kaltim	2,00	Unit	788.750.000	PAD	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	493.885.656	PAD	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kaltim	1,00	Laporan	15.000.000	PAD	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kaltim	12,00	Laporan	63.500.400	PAD	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kaltim	12,00	Laporan	415.385.256	PAD	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Prov. Kaltim	12,00	Bulan	283.899.500	PAD	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Kaltim	18,00	Unit	150.194.000	PAD	
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kaltim	75,00	Unit	133.705.500	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	Prov. Kaltim	-	-	68.182.658.090	PAD	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Prov. Kaltim	-	-	68.182.658.090	PAD	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	8,00	%	1.728.295.000	PAD	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	12187,00	Orang	1.728.295.000	PAD	
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	19.510.000	PAD	
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	5.280.000	PAD	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal	Prov. Kaltim	1370,00	Orang	1.152.705.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
		Ika dan Sejarah Kebangsaan						
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	18,00	Orang	206.400.000	PAD	
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	4,00	Laporan	344.400.000	PAD	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	Prov. Kaltim	75,50	%	3.789.628.800	PAD	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan	Prov. Kaltim	56,85	%	3.789.628.800	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	1.950.770.800	PAD	
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	3.240.000	PAD	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	605,00	Orang	976.194.000	PAD	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	Prov. Kaltim	42,00	Orang	405.412.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	4,00	Laporan	454.012.000	PAD	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	Prov. Kaltim	40,05	%	58.023.670.290	PAD	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	Prov. Kaltim	147,00	Organisasi Masyarakat	58.023.670.290	PAD	
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	18.652.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
	Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun						
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	1.166.000	PAD	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	330,00	Orang	57.702.652.290	PAD	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	11,00	Orang	108.000.000	PAD	
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	4,00	Laporan	193.200.000	PAD	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Prov. Kaltim	100,00	%	822.380.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Prov. Kaltim	4,00	Rekomendasi	822.380.000	PAD	
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	364.000	PAD	
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	1.200.000	PAD	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	410,00	Orang	532.216.000	PAD	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial.	Prov. Kaltim	12,00	Orang	108.000.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	4,00	Laporan	180.600.000	PAD	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	Prov. Kaltim	33,00	%	3.818.684.000	PAD	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penurunan Jumlah Konflik Ipoleksosbud	Prov. Kaltim	85,00	Konflik	3.818.684.000	PAD	
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	720.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
		Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Prov. Kaltim	550,00	Dokumen	2.568.000	PAD	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	200,00	Orang	901.261.000	PAD	
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	22,00	Orang	216.000.000	PAD	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan	Prov. Kaltim	4,00	Laporan	302.400.000	PAD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Perubahan Tahun 2022				Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah						
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	1,00	Dokumen	2.395.735.000	PAD	

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Perubahan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan (2021).

Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Visi dan Misi instansi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Samarinda, 19 Juli 2022
Kepala Badan,

Drs.Sufian Agus, M.Si.

NIP. 19660204 198803 1 016

